

PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Fakhrus Naufal¹, Khairul Rahman²

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Email: fakhrusnaufal@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The effective and efficient implementation of village government highly depends on the role of the camat in providing guidance to the village officials. In Peranap District, Indragiri Hulu Regency, although there have been efforts made by the camat to provide supervision, there are still challenges faced, such as issues in communication, understanding of the vision, and limited resources. Therefore, this study aims to explore the role of the camat in the supervision of village government and the factors inhibiting the process in Peranap District. This study aims to: 1) Identify the role of the camat in the supervision of village government implementation in Peranap District, Indragiri Hulu Regency, and 2) Identify the inhibiting factors faced by the camat in performing the supervision task. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with the camat, village heads, and village staff involved in the village government in Peranap District. Data analysis was performed using thematic analysis, focusing on identifying key themes that emerged from the interviews. The research findings show that the role of the camat in supervising village government implementation is quite effective, particularly in providing written and verbal instructions, as well as conducting field visits. However, there are significant challenges, such as the lack of administrative capacity at the village level, miscommunication, and budget limitations that hinder program implementation. The main inhibiting factors include the unpreparedness of village officials, lack of regular training, and insufficient facilities. Based on these findings, it is recommended that the camat strengthen the administration training for village staff and expedite the updating of operational guidelines to improve the quality of village government supervision in Peranap District.

Keywords: Camat's Role, Supervision, Village Administration.

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan unit administrasi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mengelola wilayahnya. Di dalam kecamatan, terdapat beberapa desa yang menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Desa-desanya ini merupakan unit terkecil dalam administrasi pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari penduduk. Dengan adanya keterkaitan antara kecamatan dan desa-desa di dalamnya, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam memajukan potensi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 poin g, disebutkan bahwa tugas camat adalah “membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa”. Tugas ini mencakup berbagai hal,

seperti memastikan bahwa desa melaksanakan kegiatan administrasi, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Camat juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kepala desa serta perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai pengawas, camat juga harus memastikan bahwa desa tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Ini termasuk memastikan bahwa desa tidak melanggar hak-hak masyarakat atau kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, program pemberdayaan masyarakat dipercaya pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota. Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif homogeny serta banyak tergantung pada alam. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui mengenai program-program pembinaan penyelenggaraan desa adalah upaya yang terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui fakta di lapangan pada kenyataannya sebagai berikut:

1. Camat jarang memberikan bimbingan secara rutin kepada kepala desa dan perangkat desa tentang strategi pengembangan desa yang berkelanjutan. Camat terkadang hanya memberikan pengarahan dalam acara formal tanpa melakukan tindak lanjut yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Hal ini menyebabkan banyak kepala desa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola desa yang efektif.
2. Camat sering kali hanya menghadiri acara seremonial desa tanpa memberikan arahan dan bimbingan yang mendalam tentang bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Misalnya, pada acara musyawarah desa, Camat hanya memberikan sambutan singkat tanpa memberikan solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi desa.
3. Terdapat ketidaksepahaman antara Camat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai prioritas pembangunan desa. Misalnya, Camat lebih fokus pada proyek infrastruktur sementara BPD menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sering menyebabkan konflik dan penundaan dalam pelaksanaan program desa.

4. Camat belum memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada kepala desa dan perangkat desa dalam hal penyelenggaraan dan pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena penelitian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditenggarainya. Alasan pemilihan judul ini fokus pada bagaimana camat dapat berperan sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi lokal dengan pendekatan yang terintegrasi. Misalnya, camat bisa berperan dalam mengembangkan model pembinaan yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan desa, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bisa menunjukkan bagaimana pembinaan yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembinaan pemerintahan desa, perlu adanya analisis mendalam terhadap fenomena-fenomena permasalahan ini dan pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Camat di Peranap. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi camat dalam menjalankan pembinaan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka serta penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disimpulkan secara mendalam.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di kantor camat dan perangkat desa terkait. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pra-survei yang menunjukkan adanya berbagai fenomena yang relevan dengan peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat memiliki peran penting dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan edukasi dan instruksi kepada aparatur desa guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan key informan yang memiliki keterkaitan dengan peran camat, seperti camat, perangkat desa, serta pihak lain yang berhubungan dengan proses pembinaan. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Peranap.

PEMBAHASAN

Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan, instruksi, serta penyediaan buku petunjuk. Masing-masing indikator ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana camat berinteraksi dan memberikan dukungan kepada desa. Pemberian bimbingan mencakup kegiatan seperti pertemuan rutin dan penyampaian panduan administrasi, sedangkan pengarahan berfokus pada penyampaian visi dan implementasi program dengan jelas. Pendidikan dan pelatihan melibatkan peningkatan kompetensi aparatur desa, sementara instruksi memberikan arahan langsung untuk tindakan tertentu. Terakhir, buku petunjuk berfungsi sebagai referensi standar dalam pelaksanaan tugas. Dengan menggunakan indikator ini, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa di wilayah tersebut.

Pemberian Bimbingan

Camat berperan dalam pemberian bimbingan kepada kepala desa dan stafnya merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan dengan baik. Bimbingan ini tidak hanya mencakup arahan dan dukungan, tetapi juga pembinaan melalui pertemuan rutin dan saran yang relevan dengan kondisi di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap aparatur desa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih tepat dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Camat Peranap mengenai pelaksanaan pertemuan dengan kepala desa dan staf yang tidak terjadwal secara rutin, tetapi minimal dilakukan sekali dalam setiap triwulan, mencerminkan tantangan dalam manajemen waktu dan prioritas kerja. Pertemuan ini penting untuk membahas isu-isu terkini, evaluasi progres program, serta kendala yang dihadapi desa. Namun, ketidakkonsistenan dalam jadwal pertemuan menunjukkan adanya hambatan, seperti tingginya beban kerja Camat dan keterbatasan sumber daya, baik waktu maupun tenaga.

Dalam konteks pemerintahan desa, pemberian bimbingan oleh Camat Peranap merupakan proses penting dalam menciptakan tata kelola desa yang efektif. Bimbingan mencakup arahan, dukungan, serta saran yang diberikan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Santoso, pembinaan merupakan peran strategis yang mencakup pemberian arahan, motivasi, dan dukungan agar bawahan dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Bimbingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan lokal, dan memastikan sinkronisasi kebijakan antara tingkat kecamatan dan desa. Beberapa alasan pentingnya pemberian bimbingan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi**

Desa adalah entitas pemerintahan terkecil, sehingga kepala desa sering memerlukan arahan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa bimbingan yang memadai, pelaksanaan tata kelola desa dapat menyimpang dari standar yang ditetapkan.

2) Peningkatan Kapasitas SDM

Tidak semua perangkat desa memiliki kompetensi atau pengalaman yang memadai, sehingga mereka membutuhkan arahan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan administratif.

3) Sinkronisasi Program

Bimbingan memastikan bahwa program di tingkat desa sejalan dengan visi pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Bimbingan yang diberikan oleh Camat Peranap harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka dengan kondisi bawahan, terutama bagi Pemerintah Desa Baturijal Barat dan Hulu terkait pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketika perangkat desa belum memiliki kompetensi yang cukup, Camat perlu memberikan instruksi yang lebih rinci, seperti melalui pelatihan dan panduan langsung.
- 2) Jika perangkat desa menunjukkan kemajuan, peran Camat dapat bergeser menjadi lebih partisipatif, dengan melibatkan perangkat desa dalam diskusi terkait kebijakan. Pendekatan situasional ini menjelaskan mengapa pemberian bimbingan berbeda-beda tergantung pada tingkat kesiapan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan, pemberian bimbingan sering dilakukan melalui pertemuan rutin dan konsultasi langsung. Pertemuan rutin menjadi sarana utama bagi Camat untuk memastikan adanya komunikasi langsung dengan perangkat desa. Ini penting karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah. Desa dapat melaporkan kendala yang mereka hadapi, sementara Camat dapat memberikan solusi yang kontekstual. Keterbatasan waktu atau kurangnya antusiasme perangkat desa sering kali mengurangi efektivitas pertemuan. Hal ini mencerminkan pentingnya pemberian bimbingan yang fleksibel, seperti menggunakan teknologi untuk mengatasi keterbatasan fisik.

Memberikan Pengarahan

Kepemimpinan Camat Peranap dalam memberikan pengarahan senantiasa menggunakan jalan musyawarah untuk dapat memutuskan suatu keputusan sehingga melibatkan seluruh pegawai sekaligus mendahulukan kepentingan bersama. Sikap kepemimpinan semacam ini juga dikenal sebagai kepemimpinan yang demokratis yakni memberikan ruang kepada pegawai untuk dapat mengeluarkan pendapat dan suaranya pada suatu forum diskusi sehingga masukan ataupun saran yang diberikan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan atas kesepakatan bersama.

Disamping itu, salah satu faktor yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses konsultasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam membina pemerintah Desa/Kelurahan dapat digunakan beberapa indikator:

a. Memberi masukan

Memberi masukan adalah salah satu indikator penting dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh Kecamatan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan. Masukan ini biasanya berbentuk saran, rekomendasi, atau arahan yang diberikan oleh Camat atau pihak Kecamatan kepada aparat desa untuk meningkatkan kinerja atau menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Menerima Keluhan

Menerima keluhan adalah indikator yang mengukur bagaimana Kecamatan mendengarkan dan menanggapi masalah atau keluhan yang diajukan oleh perangkat desa atau masyarakat terkait dengan pemerintahan desa. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang ada di tingkat desa dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Kecamatan.

c. Memberi Penjelasan

Memberi penjelasan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana Kecamatan mampu menjelaskan kebijakan, program, atau regulasi yang harus diterapkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan. Penjelasan ini penting agar perangkat desa dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di desa. Tanpa penjelasan yang baik, perangkat desa mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan atau menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d. Fasilitas

Fasilitas mengacu pada dukungan infrastruktur atau sumber daya yang diberikan oleh Kecamatan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Fasilitas ini bisa berupa peralatan administrasi, akses teknologi, atau dukungan anggaran yang dibutuhkan desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan secara efisien. Tanpa fasilitas yang memadai, perangkat desa mungkin kesulitan dalam melaksanakan tugas administratif atau pembangunan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan desa dalam setiap bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembinaan, peningkatan intensitas bimbingan teknis, serta kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Peranap.

Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Program pelatihan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik desa, sehingga setiap peserta dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut dan mengaplikasikan ilmunya dalam tugas sehari-hari. Salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Camat Peranap adalah pemberian *workshop*. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana pengadaan *workshop* atau pelatihan khusus tentang manajemen administrasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, termasuk perangkat desa, BPD, dan pejabat kecamatan, menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Camat Peranap terhadap pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun upaya bimbingan, pengarahan, pendidikan, dan pelatihan telah dilakukan, intensitas dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa perangkat desa merasa bahwa bimbingan yang diberikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di desa mereka. Selain itu, kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya frekuensi pelatihan, serta kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi terbaru menjadi hambatan utama dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.

Dari sisi pengarahan, meskipun Camat telah memberikan panduan secara lisan dan tertulis, penerapannya di tingkat desa masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber

daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang disampaikan. Sementara itu, dalam aspek pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan workshop dan bimbingan teknis dinilai bermanfaat, namun masih belum merata di semua desa. Perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda juga menghadapi tantangan dalam menyerap materi yang diberikan.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan desa dalam setiap bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembinaan, peningkatan intensitas bimbingan teknis, serta kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Peranap.

Memberikan Instruksi-instruksi

Sebagai camat, pemberian instruksi-instruksi kepada aparatur desa adalah tanggung jawab penting yang harus dijalankan. Instruksi ini bersifat spesifik dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam situasi darurat atau ketika tantangan tertentu muncul, camat harus bisa memberikan arahan yang jelas agar masing-masing staf desa dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dengan segera dan efektif. Peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan tentang penyediaan manual atau panduan operasional yang bisa digunakan oleh staf desa.

Instruksi-instruksi yang diberikan oleh Camat kepada perangkat desa berperan penting dalam memastikan kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program di tingkat desa. Instruksi ini tidak hanya berfungsi sebagai arahan teknis dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghadapi situasi tertentu yang memerlukan respons cepat dan tepat. Namun, efektivitas instruksi tersebut sangat bergantung pada bagaimana perangkat desa memahami, menerima, dan menerapkannya dalam praktik kerja mereka.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemberian instruksi oleh Camat Peranap masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek, terutama dalam hal kejelasan teknis, tindak lanjut, dan pendampingan implementasi di tingkat desa. Instruksi yang diberikan tidak hanya harus bersifat administratif tetapi juga harus mencakup solusi konkret terhadap kendala yang dihadapi perangkat desa. Selain itu, pelatihan berkala mengenai penerapan instruksi dan penggunaan panduan operasional juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar perangkat desa dapat lebih memahami dan menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Pemerintah kecamatan perlu lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap instruksi yang diberikan telah dipahami dengan baik oleh perangkat desa. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan intensitas koordinasi, evaluasi pasca-pemberian instruksi, serta penguatan pendampingan teknis dalam implementasi kebijakan desa. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan perangkat desa dapat bekerja lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Memberikan Buku Petunjuk

Penyediaan buku petunjuk sebagai pedoman tertulis bagi aparatur desa adalah strategi yang digunakan untuk memastikan agar semua orang memahami prosedur dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Buku petunjuk ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan adanya panduan

yang jelas, berharap setiap aparat desa dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Camat Peranap menyebutkan bahwa meskipun panduan telah tersedia, tidak semua perangkat desa menggunakannya secara optimal. Salah satu alasan utama adalah kurangnya pemahaman menyeluruh tentang penggunaan panduan tersebut. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan dalam pembaruan yang membutuhkan waktu lama karena harus menunggu instruksi dari tingkat kabupaten. Proses yang lambat dalam pembaruan buku petunjuk ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pedoman yang ada dengan perkembangan kebutuhan operasional di desa.

Keberadaan buku petunjuk saja tidak cukup tanpa adanya sosialisasi dan pelatihan tambahan untuk membantu perangkat desa memahami serta menerapkan isi buku petunjuk dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun penyediaan buku petunjuk sudah dilakukan, keberhasilan penerapannya belum maksimal. Diperlukan perbaikan dalam hal pembaruan yang lebih cepat, peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap panduan yang diberikan, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa buku petunjuk digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada.

Faktor Penghambat Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dijabarkan di atas, berikut ini dijabarkan mengenai faktor penghambat camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

a. Ketidaksiapan Perangkat Desa

Ketidaksiapan ini mencakup kekurangan dalam pengelolaan anggaran, pembuatan laporan yang sesuai standar, serta pemahaman yang terbatas mengenai regulasi yang berlaku. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program dan menyulitkan camat dalam memberikan arahan yang jelas dan efektif.

b. Komunikasi yang Kurang Efektif

Meskipun terdapat arahan dan instruksi dari camat, terkadang komunikasi antara camat dan perangkat desa tidak sepenuhnya efektif. Hal ini menyebabkan miskomunikasi yang memperlambat implementasi program-program pemerintah. Walaupun camat telah memberikan instruksi kepada perangkat desa, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan misinterpretasi atau keterlambatan dalam pelaksanaan.

c. Keterbatasan Anggaran

Meskipun camat menyatakan bahwa anggaran telah dialokasikan dengan baik, kenyataannya masih banyak perangkat desa yang merasa anggaran untuk pembinaan kurang mencukupi. Transparansi anggaran dan efisiensi penggunaan dana menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

d. Waktu yang Terbatas

Camat memiliki banyak tugas dan kewajiban lain selain melakukan pembinaan terhadap desa. Keterbatasan waktu ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan kunjungan lapangan atau

memberikan pendampingan lebih intens kepada desa. Keterbatasan waktu ini membuat camat kesulitan untuk melakukan pemantauan atau memberikan pendampingan langsung yang dapat mempercepat proses pembinaan desa.

e. Perbedaan Pemahaman Antar Desa

Tidak semua kepala desa memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan tujuan camat. Beberapa kepala desa mungkin memiliki pemahaman yang berbeda, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat mengikuti arahan dengan benar. Perbedaan ini bisa menyebabkan beberapa desa kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan camat secara konsisten, yang pada gilirannya dapat memperlambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

f. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terlatih

Kurangnya pelatihan atau workshop untuk perangkat desa menyebabkan rendahnya kapasitas mereka dalam mengelola pemerintahan desa, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, perangkat desa akan kesulitan dalam mengelola administrasi, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan yang diperlukan. Hal ini membuat pembinaan camat menjadi kurang efektif karena perangkat desa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

g. Ketergantungan pada Instruksi Kabupaten

Proses pembaruan buku petunjuk atau instruksi lainnya sering kali bergantung pada keputusan yang datang dari tingkat kabupaten. Ketergantungan ini memperlambat proses pembaruan dan membuat perangkat desa sulit menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Pembaruan panduan atau kebijakan yang datang dari kabupaten sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, karena camat harus menunggu instruksi atau pedoman baru dari tingkat yang lebih tinggi. Ketergantungan ini memperlambat implementasi kebijakan dan membuat perangkat desa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

h. Tantangan dalam Sosialisasi Program

Masyarakat desa sering kali lambat dalam merespons program pemerintah karena kurangnya sosialisasi yang efektif. Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai program-program desa membuat implementasi berjalan kurang optimal. Sosialisasi yang kurang efektif atau terlambat menyebabkan masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam program tersebut, sehingga berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program yang dimaksud.

i. Keterbatasan Infrastruktur

Beberapa desa di Kecamatan Peranap masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur, baik itu infrastruktur fisik maupun teknologi, yang membatasi efektivitas pembinaan yang dapat dilakukan oleh camat. Infrastruktur yang terbatas menghambat alur komunikasi, pencatatan, dan pengelolaan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

j. Perubahan Kebijakan yang Mendadak

Perubahan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi sering kali datang mendadak, sehingga camat dan perangkat desa tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan

kebijakan tersebut secara maksimal di tingkat desa. Perubahan yang mendadak ini membuat desa kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan baru, yang bisa mengganggu kelancaran administrasi dan operasional desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Tantangan-tantangan tersebut mencakup ketidaksiapan perangkat desa, komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan anggaran, serta waktu yang terbatas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, perbedaan pemahaman antar desa, kurangnya sumber daya manusia, serta ketergantungan pada instruksi dari kabupaten juga menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pembinaan.

Tantangan dalam sosialisasi program menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan yang kurang memadai dan konektivitas komunikasi yang terbatas, turut berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, perubahan kebijakan yang mendadak sering kali membuat perangkat desa kesulitan dalam beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan baru secara optimal.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan bimbingan yang lebih intensif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi dan sosialisasi program. Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur secara bertahap dan sistem komunikasi yang lebih responsif juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembinaan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa, camat Kecamatan Peranap telah menjalankan peran pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum sepenuhnya optimal karena masih jarang memberikan bimbingan yang spesifik sesuai kebutuhan masing-masing desa. Dalam praktiknya, camat telah melakukan pertemuan berkala dengan kepala desa untuk membahas regulasi dan kebijakan terbaru, tetapi beberapa kepala desa merasa bahwa bimbingan yang diberikan masih bersifat umum.

Camat Kecamatan Peranap menjalankan peran pembinaan dengan berbagai mekanisme, antara lain melalui pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan, serta instruksi kepada perangkat desa. Dalam praktiknya. Selain itu, dalam pemberian instruksi, camat telah menyediakan buku panduan operasional dalam bentuk cetak dan digital, tetapi implementasinya di tingkat desa belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari perangkat desa.

Selain itu, meskipun camat melakukan pengawasan langsung melalui kunjungan ke desa-desa, keterbatasan waktu sering kali menghambat efektivitas pengawasan ini. Dalam aspek koordinasi, camat telah menjalin komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih ditemukan adanya kendala dalam keselarasan pemahaman antara camat, kepala desa, dan BPD terkait kebijakan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adven, H. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4 (2), 1-11.
- Afrida, W., & Husna, C. A. (2022). Peran Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.840>
- Amelia. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Jakarta: Erlangga.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakir, P. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Budiman, R. (2015). *Hukum Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhli, M., Sos, S., & Si, M. (2014). Camat dan Kecamatan Menurut UU No 23 Tahun 2014. (23), 1-6.
- Fisabillillah, Y., & Roisul Basyar, M. (2023). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(02), 18-25.
- Hadiyanti, H. (2015). Peran Kepemimpinan, Kinerja Kepemimpinan Pengertian Kepemimpinan. 3(1), 206-219.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Samarinda: Bina Ilmu.
- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 289-299. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.307>
- Lestari, R. (2013). Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kecamatan Mojoroto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 157-164.
- Loi, R. R., & Buulolo, G. (2021). Peranan Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Governance Opinion*, 6, 176-186.
- Murti, H., & Srimulyani, V. A. (2013). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel Pemediasi Kepuasan Kerja pada PDAM Kota Madiun. *JRMA Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 10-17.
- Semaun, F. (1967). Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Sungai Terbelian Kabupaten Sintang. *36 Perahu*, 5(1), 35- 44.

Suhardi, A. J., Suni, B., Syafei, M., Studi, P., Negara, A., & Pontianak, U. T. (2013). Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. 1-17.